



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

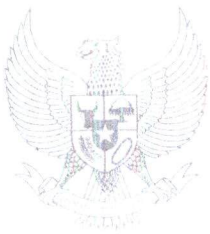
Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA:...

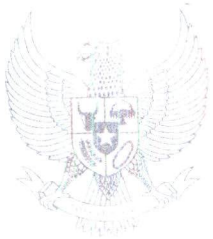


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KEDUA : 1. Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*).
2. Besaran target penghematan per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian program/kegiatan yang dihemat sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
4. Dalam rangka blokir mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mencantumkan catatan dalam halaman IV DIPA kepada Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan, untuk disahkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku.
- KETIGA : Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran

lainnya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

lainnya, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.

- KEEMPAT : Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga tidak dilakukan terhadap:
- a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; dan
 - b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).
- KELIMA : Pelaksanaan pemotongan belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 disahkan.
- KEENAM : Menteri Keuangan:
1. Mengoordinasikan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga;
 2. Mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan Kementerian/Lembaga sebagai hasil blokir mandiri sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan penghematan dan pemotongan kepada Presiden.
- KETUJUH : Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan memantau dan melaporkan pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran kepada Presiden, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 MEI 2016

BESARAN TARGET PENGHEMATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2016

(ribu rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN TA 2016	PENGHEMATAN RUPIAH MURNI			Keterangan: Dalam Total Penghematan tersebut pada Kolom 7 Sudah Termasuk Penghematan/ Pemotongan Rupiah Murni	
				EFISIENSI BELANJA OPERASIONAL	EFISIENSI BELANJA LAINNYA	TOTAL	ANGGARAN PENDIDIKAN	ANGGARAN KESEHATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	953.302.827,0	89.180.523,8	95.867.400,0	185.047.923,9	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.223.295.696,0	105.538.716,7	395.063.938,5	500.602.655,2	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.471.229.450,0	60.125.737,9	18.434.262,1	78.560.000,0	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8.964.879.492,0	100.428.140,6	93.736.042,1	194.164.182,7	-	-
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.527.592.621,0	95.077.297,7	67.689.490,9	162.766.788,6	-	-
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.158.501.491,0	79.294.505,9	74.860.812,2	154.155.318,0	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5.124.503.315,0	997.071.922,5	388.559.107,1	1.385.631.029,6	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.331.311.770,0	202.980.843,2	210.144.852,6	413.125.695,8	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	99.462.051.493,0	1.062.603.007,8	1.794.648.440,0	2.857.251.447,8	5.757.909,0	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	9.531.863.581,0	172.357.610,4	106.999.359,3	279.356.969,7	-	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	39.278.335.504,0	821.398.237,4	646.036.355,4	1.467.434.592,7	2.658.755,2	-
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	31.507.186.127,0	1.623.927.499,5	2.299.076.306,0	3.923.003.805,6	8.863.969,0	-
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.256.691.742,0	176.533.617,0	192.967.080,4	369.500.697,5	42.531.773,4	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.563.883.834,0	217.883.627,7	553.988.150,6	771.871.778,2	16.405.167,2	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	48.465.647.322,0	1.385.005.180,3	2.365.189.627,6	3.750.194.807,8	415.344.116,9	-
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49.232.799.474,0	3.633.015.201,2	2.890.856.532,4	6.523.871.733,5	6.523.871.733,5	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	63.481.597.001,0	685.009.816,0	366.432.981,7	1.051.442.797,7	-	1.051.442.797,7
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	57.120.500.963,0	513.492.058,0	885.929.837,9	1.399.421.895,9	1.392.690.438,6	-
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.801.684.299,0	318.175.673,1	242.046.432,6	560.222.105,7	34.927.802,1	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	14.680.987.843,0	433.803.725,2	1.148.250.910,2	1.582.054.635,4	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.113.936.955,0	50.929.506,0	197.554.322,2	248.483.828,2	5.685.144,2	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.801.192.731,0	1.561.497.221,0	1.328.973.082,0	2.890.470.303,0	66.591.836,9	-
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	104.080.698.865,0	1.894.371.524,0	6.601.025.216,2	8.495.396.740,3	-	-
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	292.678.497,0	28.487.065,4	23.275.469,9	51.762.535,4	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	361.614.997,0	18.818.377,4	23.578.961,5	42.397.338,9	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN TA 2016	PENGHEMATAN RUPIAH MURNI			Keterangan: Dalam Total Penghematan tersebut pada Kolom 7 Sudah Termasuk Penghematan/ Pemotongan Rupiah Murni	
				EFISIENSI BELANJA OPERASIONAL	EFISIENSI BELANJA LAINNYA	TOTAL	ANGGARAN PENDIDIKAN	ANGGARAN KESEHATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	487.378.446,0	50.448.170,7	43.443.084,2	93.891.254,9	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	5.409.025.863,0	560.568.995,8	224.094.600,6	784.663.596,4	57.189.821,0	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	345.000.000,0	58.748.645,1	36.328.687,7	95.077.332,9	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	40.627.378.612,0	393.014.549,0	1.560.237.919,8	1.953.252.468,8	1.953.252.468,8	-
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.233.184.526,0	80.755.576,7	86.990.232,8	167.745.809,5	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	769.331.578,0	85.300.568,9	76.395.989,3	161.696.558,3	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	205.386.227,0	13.272.727,2	11.528.855,6	24.801.582,8	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.018.260.108,0	23.535.488,4	131.178.261,6	154.713.750,0	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	905.446.595,0	48.378.771,6	66.283.371,5	114.662.143,1	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	45.958.904,0	716.135,2	1.536.032,0	2.252.167,2	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	5.439.733.201,0	262.115.025,0	268.969.301,3	531.084.326,2	-	-
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.463.944.435,0	15.885.423,7	46.352.194,3	62.237.618,0	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6.387.870.051,0	171.564.847,3	196.434.164,7	367.999.012,0	-	-
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	701.101.136,0	12.458.808,8	76.373.575,0	88.832.383,8	88.832.383,8	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.174.314.243,0	17.996.174,8	33.225.427,2	51.221.602,0	1.836.545,5	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	73.002.916.309,0	706.802.867,1	853.505.410,3	1.560.308.277,5	-	-
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.617.444.585,0	50.926.834,0	27.242.341,9	78.169.175,9	-	78.169.175,9
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	314.258.703,0	3.865.127,3	17.357.977,0	21.223.104,3	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	520.901.324,0	5.373.872,1	27.061.889,4	32.435.761,5	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.367.802.022,0	50.621.499,0	14.886.944,7	65.508.443,7	-	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	8.554.507.853,0	93.595.387,8	448.574.968,2	542.170.356,0	28.646.638,8	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.864.657.742,0	198.763.350,0	106.324.676,4	305.088.026,4	-	305.088.026,4
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	93.956.146,0	10.623.877,9	5.513.569,1	16.137.447,0	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.554.480.621,0	75.015.116,4	83.891.388,9	158.906.505,3	-	-
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.648.147.842,0	11.297.736,6	25.068.415,1	36.366.151,7	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN TA 2016	PENGHEMATAN RUPIAH MURNI			Keterangan: Dalam Total Penghematan tersebut pada Kolom 7 Sudah Termasuk Penghematan/Pemotongan Rupiah Murni	
				EFISIENSI BELANJA OPERASIONAL	EFISIENSI BELANJA LAINNYA	TOTAL	ANGGARAN PENDIDIKAN	ANGGARAN KESEHATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	250.368.908,0	13.885.580,2	12.546.761,3	26.432.341,5	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	190.000.000,0	4.375.084,9	11.416.549,3	15.791.634,3	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.178.233.339,0	35.095.609,1	40.430.278,9	75.525.888,0	-	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	814.880.249,0	24.893.759,7	29.705.754,7	54.599.514,4	801.556,2	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	977.094.382,0	38.548.508,4	38.989.660,0	77.538.168,3	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	777.498.642,0	29.063.585,2	46.188.151,2	75.251.736,4	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	865.537.644,0	81.905.952,3	76.385.591,6	158.291.543,9	-	-
58	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	246.877.155,0	116.696.331,5	4.002.684,2	120.699.015,6	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	190.772.897,0	18.154.520,0	5.338.943,7	23.493.463,7	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	273.146.483,0	6.520.935,6	6.406.470,1	12.927.405,7	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	206.687.386,0	21.279.284,3	14.020.282,5	35.299.566,9	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	555.214.115,0	10.624.158,2	16.053.725,3	26.677.883,5	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.633.413.914,0	5.390.636,2	14.544.246,9	19.934.883,1	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.952.709.468,0	197.302.114,7	285.774.696,1	483.076.810,8	-	-
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.302.254.708,0	397.345.170,6	211.970.930,7	609.316.101,3	262.611.939,8	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.061.469.984,0	21.139.441,7	48.462.554,2	69.601.995,9	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.027.015.034,0	141.076.651,2	84.782.946,6	225.859.597,7	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL RI	148.874.879,0	27.937.494,2	10.593.758,8	38.531.253,0	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.186.902.448,0	76.230.082,7	56.771.281,6	133.001.364,4	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	415.046.706,0	39.089.741,2	29.486.687,0	68.576.428,3	-	-
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	500.048.585,0	5.613.192,9	36.135.727,4	41.748.920,3	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	240.792.573,0	39.406.392,2	24.796.624,1	64.203.016,3	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.432.366.156,0	50.561.852,2	142.929.597,3	193.491.449,5	-	-
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	116.460.861,0	14.348.972,7	12.659.672,0	27.008.644,7	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	318.550.954,0	12.369.807,5	24.638.801,1	37.008.608,5	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	146.332.581,0	23.286.622,9	11.989.706,1	35.276.329,0	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	200.599.529,0	13.591.799,7	7.255.554,6	20.847.354,3	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.169.799.756,0	1.588.462,6	11.100.161,5	12.688.624,0	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN TA 2016	PENGHEMATAN RUPIAH MURNI			Keterangan: Dalam Total Penghematan tersebut pada Kolom 7 Sudah Termasuk Penghematan/ Pemotongan Rupiah Murni	
				EFISIENSI BELANJA OPERASIONAL	EFISIENSI BELANJA LAINNYA	TOTAL	ANGGARAN PENDIDIKAN	ANGGARAN KESEHATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	531.914.878,0	3.545.825,9	16.172.892,2	19.718.718,1	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	222.786.973,0	18.884.307,6	12.077.360,9	30.961.668,5	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	446.928.781,0	3.746.365,0	26.179.563,1	29.925.928,1	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	864.423.065,0	42.683.673,3	26.691.795,8	69.375.469,1	-	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	930.262.532,0	29.791.072,6	38.615.723,3	68.406.795,9	-	-
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	261.385.354,0	3.534.131,5	17.685.098,4	21.219.229,9	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	334.830.911,0	1.084.875,3	7.581.098,1	8.665.973,4	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	500.000.000,0	41.095.253,5	45.679.479,4	86.774.732,9	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	1.113.831.257,0	11.257.695,6	78.668.670,1	89.926.365,7	-	-
JUMLAH			784.125.668.049,0	20.951.597.157,0	29.064.713.730,1	50.016.310.887,1	10.908.500.000,0	1.434.700.000,0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih